

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lebih dari 150 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui sebuah komitmen global “Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam upaya membangun dunia berlandaskan pada setidaknya tiga aspek penting yakni: *People, Planet, dan Prosperity*, yang ditetapkan pada September 2015. Ketiga aspek tersebut merupakan pengembangan dari komitmen yang telah terbangun sebelumnya dalam kerangka Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2005. Dalam kesepakatan SDGs terdapat 17 poin yang menjadi kunci pembangunan internasional termasuk diantaranya adalah pendidikan berkualitas pada poin 4 (SDGs 4).

Pada poin 4, negara-negara bercita-cita untuk mewujudkan pendidikan inklusif dan merata dengan kualitas yang baik. Adapun indikator untuk mencapai hal tersebut, melalui 9 target yang ingin di capai tahun 2030 mendatang dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:

1. Mengupayakan agar setiap anak bisa menempuh pendidikan hingga sekolah tinggi.
2. Mengupayakan agar tersedianya sarana dan prasarana dalam mengakses pendidikan yang ramah bagi seluruh siswa/I dan mahasiswa kejuruan tanpa memandang gender maupun yang memiliki disabilitas.

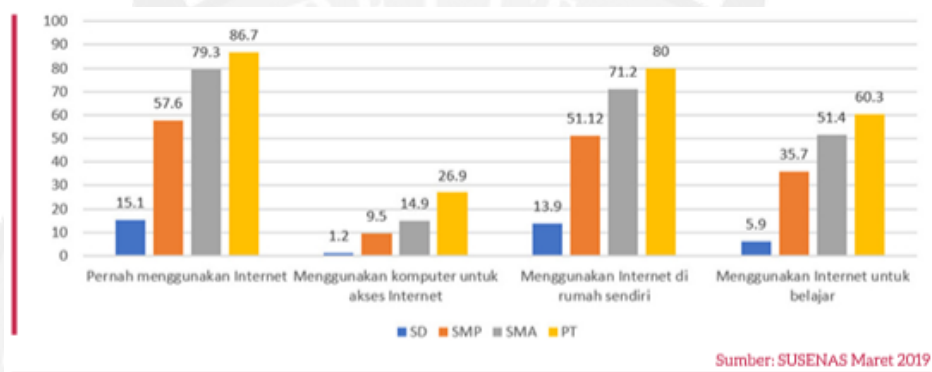
3. Meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil (SDG's UB, 2023).

Tercapainya target pada indikator tersebut adalah bagian dari upaya negara dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas secara inklusif dan merata di negaranya. Hal ini menjadi penting, karena pendidikan berkualitas berkaitan erat terhadap keberlangsungan sumber daya manusia yang bermartabat, berintegritas, dan memiliki kapabilitas intelektual yang memumpuni. Kemampuan tersebut bisa menjadi sangat baik jika diasah sejak usia dini sewaktu duduk dibangku pendidikan khususnya pada aspek moral, integritas, intelektual dan kemampuan secara *soft skill* bisa dibentuk melalui institusi pendidikan. Oleh karena itu pendidikan yang berkualitas memainkan peran peting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua penting untuk dilakukan,

Mewujudkan poin 4 SDGs bukan hal yang mudah. Banyak rintangan yang perlu dilalui negara, salah satunya pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan banyak perubahan pada kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah dalam merespon pandemi Covid-19 menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Pattinussa, 2021). Sehingga segala aktivitas masyarakat dilakukan dari jarak jauh, termasuk kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu aktivitas pada dunia pendidikan mulai bergeser

dari yang sebelumnya dilakukan secara luring atau tatap muka secara langsung di kelas, menjadi daring (Andryanto, 2021). Hal ini menjadi berbahaya karena mayoritas angkatan sekolah di Indonesia masih minim dalam menggunakan internet.

Diagram 1.1 Data Pengguna Internet pada 2019



Sumber: SUSENAS (Survey Sosial Ekonomi Nasional) BPS.go.id

Berdasarkan data susenas 2018-2019, terdapat ketimpangan dalam angkatan anak sekolah yang menggunakan internet untuk belajar. Perubahan dari sistem pembelajaran secara offline ke Online, menjadi tantangan tersendiri bagi peserta didik untuk membiasakan diri untuk bisa belajar secara daring. Tidak hanya peserta didik, para pengajar juga mengalami kendala yang sama (Anna, 2020). Tahun 2020 Universitas Pelita Harapan pernah melakukan pelatihan #NgajarDariRumah untuk 600 tenaga pendidik. Dari hasil pelatihan tersebut, 450 diantaranya masih belum mampu untuk menciptakan materi ajar digital yang dapat mendukung proses belajar mengajar (Reformanda, 2023).

Berdasarkan data yang dirilis oleh UNESCO dalam Laporan Pendidikan UNESCO (*Global Education Monitoring*) yang dirilis pada tanggal 23 Juni 2020, lembaga PBB tersebut menyatakan bahwa sebanyak 260 juta anak tidak memiliki akses terhadap pendidikan selama terjadinya COVID-19 pada tahun 2019 sampai 2020, dikarenakan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menengah tidak ada dukungan bagi pelajar yang tidak mampu secara finansial selama sekolah ditutup sementara. (UNESCO, 2020). Sejalan dengan itu, *Sustainable Development Solutions Network* (SDSN) sebagai lembaga jaringan *United Nations* (UN) pada Juni 2021 melaporkan bahwa terjadi penurunan performa pada hampir semua poin capaian termasuk pendidikan berkualitas. Dalam laporan tersebut juga dinyatakan bahwa sebagian besar negara tidak lagi *on track* dalam komitmennya untuk pembangunan internasional (UN SDSN, 2021).

Dari 191 negara yang meratifikasi SDGs, Indonesia berada di peringkat 78 dengan indeks ratifikasi dan penyelenggaraan 69.43 poin berada di atas Malaysia di peringkat 79 dengan 69.32 poin dan di bawah Jamaika di peringkat 77 dengan 69.51 poin (sdgindex.org, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di tingkat menengah dalam mengimplementasikan atau mencapai tujuan berkelanjutan. Meskipun Indonesia sendiri mencatatkan tren positif selama satu dekade terakhir dengan selalu meningkat (indeks) sebanyak rata-rata 0.64 poin per tahun, terutama tren positif dalam pengurangan kemiskinan, kesehatan, kualitas pendidikan, energi bersih. Namun, di sisi lain Indonesia juga terus mengalami penurunan pada pencatatan indeks kehidupan bawah air, penanganan sampah, dan perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat.

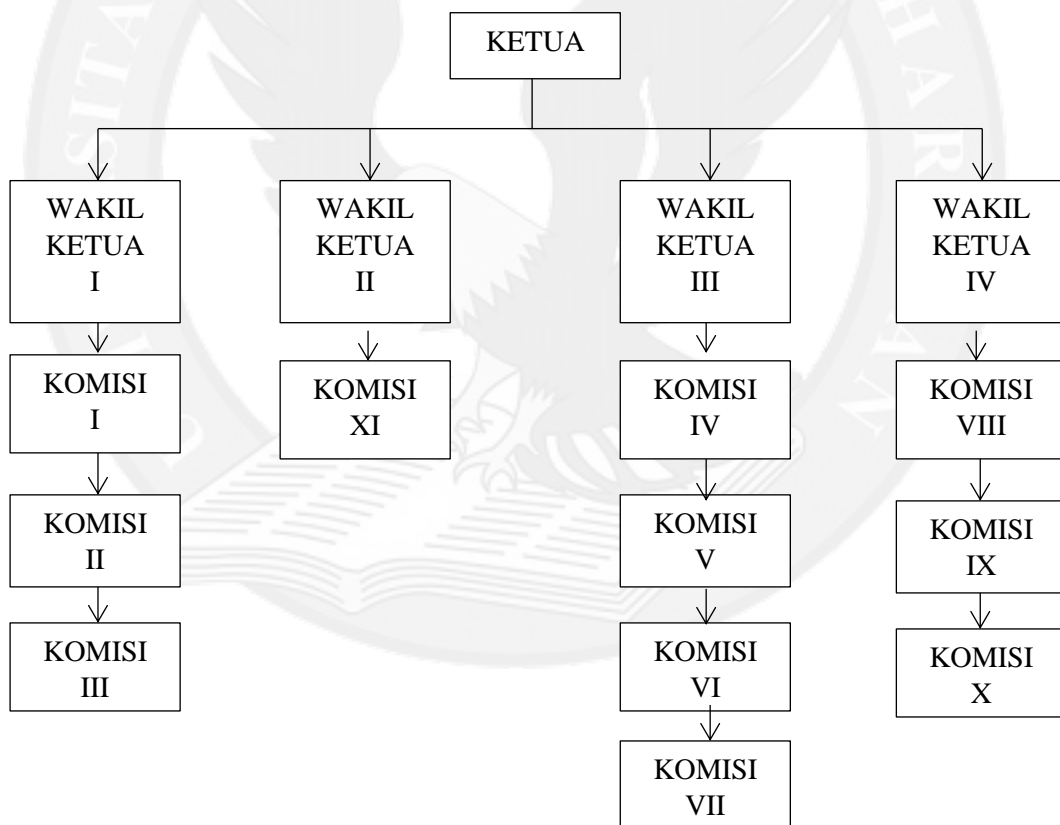
Indonesia, sebagai salah satu negara yang menyetujui agenda SDGs, berupaya mengimplementasikannya dalam kerangka kerja nasional seperti yang tertera pada pedoman rencana aksi SDGs, (BAPPENAS, 2020) termasuk persoalan pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data laporan Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2020, mengatakan bahwa angka putus sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Atas mencapai 1,38%, 1,06 untuk Sekolah Menengah Pertama, dan sebesar 0,31% pada Sekolah Dasar, yang mana angka statistik tersebut meningkat dari tahun sebelumnya. Kondisi pendidikan Indonesia saat ini tentunya akan mempengaruhi indeks capaian Indonesia untuk SDGs pada tingkat regional dan internasional. Dalam memastikan pembangunan internasional berjalan di semua tingkat sesuai dengan 169 capaian yang ditargetkan, peran negara berserta dengan lembaga legislatif turut ambil bagian.

Peran parlemen dalam hubungan internasional khususnya dalam pencapaian agenda SDGs belum dibahas secara meluas, khususnya di Indonesia. Dari sudut pandang Hubungan Internasional (HI), parlemen adalah aktor negara dan memainkan peran yang penting dalam HI dewasa ini.

Pada dasarnya lembaga legislatif yang dalam hal ini adalah DPR RI memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam pembangunan. Hal ini karena fungsi utama DPR RI yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan yang kemudian menjadi aspek penting didalam pembangunan sebuah negara (RI D. , 2016). Didalam tiga fungsi utama inilah DPR RI sebagai lembaga legislatif berdampingan dengan MPR RI dan DPD RI mengatur jalannya undang-undang dan anggaran negara serta mengawasi

jalannya pemerintahan sesuai dengan undang-undang serta anggaran negara untuk pembangunan baik secara pusat ataupun daerah. Jika dilihat dari kekuatan politik, lembaga ini sangat strategis dalam mempengaruhi sebuah sistem dalam suatu negara dan lembaga lainnya. Guna menelisik lebih dalam keterlibata parlemen dalam SDGs secara khusus dalam pendidikan berkualitas, peneliti mengambil studi kasus dari Indonesia yakni Komisi X DPR RI.

BAGAN 1.1
STUKTUR ORGANISASI DPR RI



Sumber: Buatan Penulis

Komisi X DPR RI merupakan salah satu komisi dari 11 komisi yang ada di parlemen Indonesia. Komisi ini bertanggung jawab dalam melakukan supervisi terkait terundangan, mengatur pembiayaan dan regulasi pada sektor pendidikan dan kebudayaan, pemuda dan olahraga serta pariwisata (DPR RI, 2020). Dalam menjalankan tugasnya dalam pembangunan nasional dan global, Komisi X DPR RI bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait termasuk partisipasinya dalam *World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals (SDGs)*, tidak hanya itu, pada tahun 2017, Indonesia menjadi tuan rumah dalam pertemuan ini (Infopublik, 2017).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, terlihat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara umum dan Komisi X khususnya memiliki keterlibatan dalam agenda SDGs termasuk pembangunan pendidikan sebagaimana teramatkan dalam tugasnya. Dengan demikian fokus penelitian dalam penulisan ini yaitu peran Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan global terkait akses pendidikan yang berkualitas (periode 2019-2024), dengan diperoleh 3 (tiga) pertanyaan yang juga sekaligus menjadi landasan analisis, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Komisi X DPR RI dalam pembahasan dan penanganan isu akses pendidikan berkualitas dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Global?

2. Mengapa peran Komisi X DPR RI penting dalam mendorong dan mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terkait akses pendidikan yang berkualitas di Indonesia?
3. Bagaimana Komisi X DPR RI menjalin kerja sama internasional untuk memastikan keberlanjutan komitmen agenda pendidikan berkualitas di Indonesia secara berkesinambungan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang dan pertanyaan penelitian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Komisi X DPR RI dalam pembahasan dan penanganan isu akses pendidikan berkualitas dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan.
2. Untuk mengetahui kontribusi Komisi X DPR RI dalam memastikan keberlanjutan komitmen agenda pendidikan berkualitas di Indonesia secara berkesinambungan.
3. Untuk mengetahui manfaat dari kerja sama internasional yang dilakukan Komisi X DPR RI dalam menjamin pendidikan yang berkualitas di Indonesia

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran pada dua kategori, yakni: akademis dan praktis. Kontribusi pemikiran yang disampaikan melalui tulisan ini khususnya dalam bidang pembangunan internasional. Dua kategori manfaat yang dimaksudkan penulis akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Akademis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan mengenai peran dan keterlibatan parlemen RI, dalam hal ini membahas secara spesifik Komisi X DPR RI didalam agenda pembangunan berkelanjutan atau SDGs untuk pendidikan berkualitas di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan meneguhkan pemahaman pembaca maupun akademis lainnya tentang teori liberalisme secara khusus keyakinan akan semangat kerja sama untuk mencapai kemakmuran bersama, melalui bukti yang dijabarkan dalam penelitian ini. Tidak hanya itu, temuan pada penelitian ini juga nantinya diharapkan dapat memperkaya informasi, ilmu, inspirasi baru bagi akademis lainnya yang akan melakukan penelitian atau tugas dengan topik yang serupa.
2. Praktis. Dalam praktik hubungan internasional dan pembangunan internasional, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif bagi otoritas yang menangani persoalan pendidikan, secara khusus individu yang bekerja dalam badan parlemen. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi baru guna menilai, menimbang progres kinerja yang lebih optimal, secara khusus bagi Komisi X DPR RI yang dijadikan sebagai studi kasus yang diamati pada penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Bab ini memberikan penjelasan awal secara sistematis dan latar belakang secara singkat mengenai peran Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan global terkait akses pendidikan yang berkualitas. Bab ini juga mengandung inti, dan rumusan masalah yang perlu dijawab pada penelitian ini. Dilanjutkan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti beserta kegunaan penelitian yang akan berguna bagi para pembaca. Selanjutnya bab ini diakhiri dengan gambaran umum mengenai sistematika penulisan penelitian ini.

Bab II: Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir pada bab ini membantu penalaran peneliti dalam menulis Bab IV. Bab ini berisi tinjauan pustaka yang berguna membangun pemahaman awal terhadap topik penelitian ini. Bab ini juga akan berisi kerangka teori yang akan digunakan oleh peneliti sewaktu melakukan analisis pada bagian hasil dan pembahasan di Bab IV. Adapun teori yang peneliti gunakan pada bab ini adalah pendekatan Liberalisme. Liberalisme akan membantu peneliti dalam melihat peran Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan global terkait akses pendidikan yang berkualitas, selain itu liberalisme akan membantu penlitit dalam melihat kolaborasi antara Komisi X dengan mitra sudah berjalan dengan baik atau tidak.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini agar membantu peneliti dalam menganalisis pada bagian hasil dan pembahasan. Pada bab ini juga akan menjelaskan proses penelitian yang peneliti lakukan dalam mengumpulkan data, mengolah data yang diperoleh, menganalisis, serta menyajikannya pada hasil dan pembahasan. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak yang memiliki peran penting pada upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas pada Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan meninjau dokumen pemerintah. Dari data yang dikumpulkan peneliti akan mengklasifikasikan data mana saja yang dapat digunakan, kemudian menganalisa dengan pendekatan liberalis, dan konsep yang telah peneliti jelaskan pada Bab II. Tujuannya agar dapat menggambarkan hasil kerja Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara komperhensif dalam mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan di Indonesia

Bab IV: Hasil dan Pembahasan akan menggambarkan peran Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan global terkait akses pendidikan yang berkualitas.

Dalam bab ini peneliti akan menjabarkan latar belakang kerja sama kedua negara disertai dampak ancaman kejahatan narkoba yang dirasakan oleh kedua negara. Pada bagian sub bab lainnya, peneliti akan menjabarkan: peran Komisi X DPR RI dalam Pembahasan Penanganan Isu Akses Pendidikan Berkualitas dalam Konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, kemudian dilanjutkan dengan komitmen Komisi X DPR RI dalam memastikan keberlanjutan komitmen agenda

pendidikan berkualitas di Indonesia secara berkesinambungan. Serta signifikansi peran Komisi X DPR RI penting dalam mendorong dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan terkait akses pendidikan yang berkualitas di Indonesia.

Bab V: Penutup

Bab ini akan berisi rangkuman dari empat bab sebelumnya, sekaligus menjadi penutup dari penelitian ini. Bab ini mengandung bagian kesimpulan yang membahas ringkasan dari semua hasil penelitian, dan membahas saran yang dapat diberikan oleh peneliti berkaitan dengan hasil penelitian maupun saran pada penelitian mendatang.

